



## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 di Kabupaten Jombang

Villa Makhtunin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Menur Pumpungan,

Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118

Email : [villamakhtunin@gmail.com](mailto:villamakhtunin@gmail.com)

**Abstract:** Agriculture plays a crucial role in Indonesia's economy and food security, with subsidized fertilizers being a vital component in supporting productivity and the quality of harvests. The subsidized fertilizer policy, as regulated in Minister of Agriculture Regulation No. 01 of 2024, aims to ensure the targeted distribution of fertilizers. However, issues related to distribution and the misuse of subsidized fertilizers remain significant challenges. This study aims to evaluate the implementation of the subsidized fertilizer distribution policy in Jombang Regency based on Minister of Agriculture Regulation No. 01 of 2024. Using a qualitative descriptive approach, the research gathered data through interviews with informants, observations, and documentation at the Agriculture Office of Jombang Regency. The findings show that although the e-RDCK system has improved farmers' access to subsidized fertilizers, administrative barriers and distribution delays remain major issues. Uneven distribution coverage and the misallocation of fertilizers in several areas reduce the policy's effectiveness. Improvements in distribution management and stricter supervision are necessary to ensure the sustainability of the agricultural sector and food security in Jombang Regency. The distribution of subsidized fertilizers in Jombang Regency needs to be improved through more intensive education for farmers and simplification of administrative procedures.

**Keywords:** Distribution, Policy Evaluation, Fertilizer Subsidy Policy, Food Security.

**Abstrak.** Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia, di mana pupuk bersubsidi menjadi komponen vital untuk mendukung produktivitas dan kualitas hasil panen. Kebijakan subsidi pupuk, seperti yang diatur dalam Permentan Nomor 01 Tahun 2024, bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran, namun permasalahan distribusi dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tetap menjadi tantangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-RDCK telah meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, kendala administratif dan keterlambatan distribusi masih menjadi isu utama. Cakupan distribusi yang tidak merata dan ketidaktepatan alokasi pupuk di beberapa daerah mengurangi efektivitas kebijakan. Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan distribusi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif untuk petani dan penyederhanaan prosedur administrasi.

**Kata Kunci:** Distribusi, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Subsidi Pupuk, Ketahanan Pangan

### 1. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian, pupuk memiliki peran yang sangat vital, baik dalam meningkatkan produktivitas maupun kualitas hasil panen (Yennita Sihombing, 2022; Hidayat *et al.*, 2024). Oleh karena itu, ketersediaan pupuk yang cukup dan terdistribusi secara merata

menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian di Indonesia (Kusumaningrum, 2019; Hidayat *et al.*, 2024).

Untuk mendukung produktivitas sektor pertanian, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi pupuk yang bertujuan untuk meringankan beban petani, meningkatkan hasil produksi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diatur dalam berbagai peraturan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai barang yang diawasi, dan setiap penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai kejahatan ekonomi (Kosmiko, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024, subsidi pupuk diprioritaskan untuk sembilan komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu, dan kakao. Selain itu, kebijakan subsidi pupuk juga mensyaratkan petani tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK (Kementerian Pertanian RI, 2024). Namun, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia masih menjadi isu yang krusial. Berdasarkan data Ombudsman, pendataan penerima subsidi sering kali tidak akurat, sehingga alokasi pupuk tidak tepat sasaran (Ombudman RI, 2021). Produksi pupuk domestik yang hanya mencapai 14 juta ton setiap tahun juga tidak mencukupi kebutuhan nasional sebesar 24 juta ton, menyebabkan kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi hingga 10 juta ton. Hal ini sering kali memicu kelangkaan pupuk di berbagai daerah (Tuter, 2023).

Kasus penyelewengan pupuk bersubsidi kerap ditemukan di berbagai wilayah yang mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Penyalahgunaan distribusi pupuk ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha tani serta stabilitas ketahanan pangan nasional (Yennita Sihombing, 2022; Napitupulu, 2024).

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia, khususnya melalui produksi padi. Pada tahun 2023, luas panen padi di Jombang tercatat mencapai 73.010 hektar dengan total produksi sebesar 456.169 ton. Subsektor tanaman pangan di Kabupaten Jombang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sekitar 38,16%. Namun, produksi komoditas utama di kabupaten ini masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya tantangan di tingkat usaha tani (BPS Jombang, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memberikan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Jombang, seperti Urea sebanyak 29.849 ton dan NPK sebanyak 17.171

ton. Meskipun jumlah ini relatif besar dibandingkan beberapa kota lain, permasalahan terkait distribusi dan efektivitas kebijakan subsidi pupuk masih perlu mendapat perhatian. Dengan potensi pertanian yang dimiliki, pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi yang optimal sangat diperlukan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Jombang serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan (evaluasi) Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 di Kabupaten Jombang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan otoritas hukum untuk mengawasi tatanan sosial dan memberlakukan aturan (Mustari, 2015). Bridgman dan Davis (2005), sebagaimana dijelaskan oleh Edi Suharto (2007:3), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah," baik berupa tindakan atau keputusan untuk tidak bertindak. Sementara itu, Hogwood dan Gunn (1990) menggambarkan kebijakan publik sebagai rangkaian langkah yang direncanakan untuk mencapai hasil tertentu (Anhar *et al.*, 2012).

Kebijakan publik memiliki tiga aspek utama (Bridgman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto, 2007:5):

- 1) Sebagai Tujuan: Kebijakan publik bertujuan mencapai hasil yang diinginkan masyarakat melalui tindakan pemerintah.
- 2) Sebagai Tindakan Legal: Kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi, sehingga memiliki sifat mengikat.
- 3) Sebagai Hipotesis: Kebijakan berdasarkan teori atau model sebab-akibat, mencakup asumsi perilaku, insentif, dan strategi untuk mencegah kegagalan.

Kebijakan publik dapat bersifat positif, dengan tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah, atau negatif, ketika pemerintah memilih untuk tidak bertindak meskipun keterlibatan mungkin diperlukan. Kebijakan ini bergantung pada hukum dan tindakan pemerintahan (Mustari, 2015).

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah mata rantai dalam proses kebijakan publik yang bertujuan menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan standar tertentu (Lester & Stewart dalam Budi Winarno, 165:23). Evaluasi bertujuan untuk menilai

dampak, efektivitas, dan efisiensi program serta memberikan masukan untuk perbaikan program (Rossi & Freeman, 2004). Menurut Briant & White, evaluasi kebijakan menilai sejauh mana implementasi kebijakan mendekati tujuan. Evaluasi dilakukan pada desain program, implementasi (*monitoring*), dan kegunaan program (dampak dan efisiensi). William Dunn (1998:608-609) menambahkan empat karakteristik evaluasi:

- 1) Fokus Nilai: Menentukan manfaat sosial dari kebijakan.
- 2) Interdependensi Fakta dan Nilai: Penilaian kebijakan memerlukan data faktual dan nilai-nilai sosial.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Lampau: Evaluasi retrospektif untuk menilai hasil setelah implementasi.
- 4) Dualitas Nilai: Nilai evaluasi bisa bersifat intrinsik atau ekstrinsik untuk tujuan tertentu.

### **Metode Evaluasi**

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Yulianto (2012), terdapat beberapa metode evaluasi program yang dapat digunakan (Yulianto, 2012):

- 1) *Single Program After-Only*: Informasi diperoleh berdasarkan kondisi kelompok sasaran setelah program diimplementasikan.
- 2) *Single Program Before-After*: Informasi diperoleh berdasarkan perubahan kondisi kelompok sasaran sebelum dan setelah program diimplementasikan.
- 3) *Comparative After-Only*: Informasi diperoleh dengan membandingkan kondisi kelompok sasaran (kelompok eksperimen) dan kelompok yang tidak menjadi sasaran (kelompok kontrol) setelah program dijalankan.
- 4) *Comparative Before-After*: Informasi diperoleh dengan membandingkan perubahan kondisi kelompok sasaran (kelompok eksperimen) sebelum dan setelah program diimplementasikan.

### **Aspek dalam Evaluasi Output Kebijakan**

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah diimplementasikan. Ripley (dalam Purwanto & Sulistyani, 2015, dikutip Hariani, 2017) mengemukakan beberapa aspek evaluasi output kebijakan yang dapat digunakan (Hariani, 2017):

- 1) Akses: Mengukur kemudahan kelompok sasaran dalam menjangkau program, termasuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan. Akses juga mencakup kesempatan setara bagi semua kelompok sasaran tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau afiliasi politik.

- 2) Cakupan: Menilai sejauh mana kelompok sasaran telah terjangkau oleh kebijakan yang diimplementasikan.
- 3) Frekuensi: Mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan layanan atau manfaat yang dijanjikan oleh kebijakan. Semakin sering layanan diberikan, semakin baik implementasi kebijakan.
- 4) Bias: Menilai apakah layanan yang diberikan menyimpang dengan mengutamakan kelompok yang tidak memenuhi syarat (ineligible), sehingga mengurangi keadilan bagi kelompok sasaran utama.
- 5) Service Delivery (Ketepatan Layanan): Mengukur ketepatan waktu pemberian layanan. Keterlambatan implementasi dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
- 6) Akuntabilitas: Menilai pertanggungjawaban implementor dalam menyampaikan hasil kebijakan kepada kelompok sasaran, termasuk memastikan hak-hak kelompok sasaran tidak berkurang tanpa alasan yang jelas
- 7) Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan: Menilai apakah manfaat yang diterima kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka (Hariani, 2017).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 di Kabupaten Jombang. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antarfenomena yang diteliti (Putri, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan berdasarkan indikator output kebijakan menurut Ripley, seperti akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan.

Penelitian dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik pertanian signifikan yang relevan untuk studi kebijakan pupuk bersubsidi. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan sebanyak 5 orang, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari kepala bidang sarana dan prasarana, kios penyalur, serta petani penerima pupuk bersubsidi. Data sekunder mencakup dokumen alokasi dan penyaluran pupuk, data penerima, serta informasi harga eceran tertinggi (HET). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memahami implementasi kebijakan (Sugiyono, 2021).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Evaluasi Kebijakan dengan Akses**

Berdasarkan evaluasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengacu pada Permentan Nomor 01 Tahun 2024, sistem RDKK dan e-RDKK telah memfasilitasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi, dengan kriteria penerima yang meliputi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki lahan maksimal 2 hektar. Dinas Pertanian menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara berkala kepada kelompok tani, meskipun terdapat hambatan dalam hal administrasi dan efisiensi proses. Ketersediaan pupuk di kios resmi dinilai cukup baik, namun kendala seperti kurangnya pemahaman petani mengenai aturan dan masalah sinkronisasi data masih menjadi tantangan. Petani penerima mengakui bahwa meskipun prosedur pengambilan pupuk sudah cukup mudah, kendala finansial tetap menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan pupuk tersebut.

Berdasarkan Penelitian Riki et al. (2022) Indikator akses menunjukkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan dari program atau kebijakan, termasuk kemudahan bertemu dengan penyuluh, sosialisasi program hingga ke tingkat desa, dan pemanfaatan media digital seperti grup WhatsApp untuk komunikasi. Program kartu tani, meskipun sudah terakses dengan baik, menghadapi kendala teknis pada penggunaan mesin EDC yang sering mengalami eror, sehingga proses distribusi pupuk bersubsidi terkadang harus dilakukan secara manual. Meskipun begitu, akses terhadap program ini dinilai cukup baik, meski perlu perbaikan dalam aspek teknis dan kemudahan prosedur bagi pengguna.

##### **Evaluasi Kebijakan dengan Cakupan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah berjalan baik dan sebagian besar petani menerima pupuk sesuai kebutuhan mereka. Meskipun distribusi secara umum merata dan tepat waktu, beberapa petani melaporkan adanya kekurangan jumlah pupuk pada musim tanam tertentu. Hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan ini cukup efektif, perbaikan dalam alokasi jumlah pupuk tetap diperlukan agar kebutuhan semua petani dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan Penelitian Riki et al. (2022), cakupan menunjukkan sejauh mana program kartu tani menjangkau petani sebagai sasaran utama. Program ini memungkinkan semua petani dengan lahan, baik pribadi maupun garapan, untuk mengakses pupuk bersubsidi sesuai kuota maksimal 2 hektare per kartu. Meskipun distribusi pupuk bersubsidi telah mencapai 100%, distribusi kartu tani belum sepenuhnya merata, hanya mencapai 74% secara keseluruhan, disebabkan birokrasi yang rumit.

Namun, petani yang belum menerima kartu tetap dapat menebus pupuk menggunakan KTP, karena semua petani sudah terdata dalam RDKK. Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya merata, cakupan program ini dinilai cukup baik dalam melayani kebutuhan petani.

### **Evaluasi Kebijakan dengan Frekuensi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi dilakukan tiga kali setahun, sesuai dengan musim tanam (awal musim hujan, musim kemarau, dan untuk perawatan tanaman). Secara umum, frekuensi penyaluran pupuk berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Petani melaporkan bahwa pasokan pupuk tiba tepat waktu dan mendukung keberlanjutan produktivitas pertanian. Meskipun demikian, beberapa pemilik kios melaporkan kendala teknis yang terkadang menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk, dan pada musim tanam tertentu permintaan pupuk meningkat sehingga stok cepat habis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi penyaluran cukup baik, koordinasi yang lebih baik dan penyesuaian alokasi pasokan pupuk diperlukan agar distribusi tetap lancar dan dapat memenuhi kebutuhan petani secara optimal.

Berdasarkan penelitian Riki et al. (2022), frekuensi distribusi layanan program kartu tani menunjukkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan petani. Pendistribusian kartu tani dilakukan dua kali setahun (Juli dan Oktober), sementara pupuk bersubsidi didistribusikan setiap bulan untuk mencukupi kebutuhan petani. Distribusi pupuk berjalan lancar berkat stok yang disiapkan sebelum masa tanam oleh kios pengecer dan UPTD Pertanian. Namun, distribusi kartu tani sering terlambat akibat birokrasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian dan Bank Mandiri. Meskipun layanan rutin dan berulang, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi program.

### **Evaluasi Kebijakan dengan Bias**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian menggunakan sistem E-Verval untuk memantau distribusi pupuk secara real-time. Pembaruan data RDKK dan penggunaan aplikasi i-Pubers oleh kios penyalur juga mendukung ketepatan layanan dan transparansi. Secara umum, distribusi pupuk berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan petani, meskipun beberapa kendala teknis di kios terkadang mengganggu kelancaran distribusi. Meskipun demikian, koordinasi dan pemantauan lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengoptimalkan ketepatan layanan.

Berdasarkan penelitian Riki et al. (2022), indikator bias digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian program kartu tani dengan sasaran. Hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen menunjukkan tidak ada penyimpangan dalam distribusi kartu tani

dan pupuk bersubsidi. Meskipun ada petani yang belum menerima kartu tani, mereka tetap bisa bertransaksi menggunakan KTP karena sudah terdaftar di RDKK. Distribusi pupuk melalui kios pengecer juga sesuai aturan, dengan kuota pupuk yang adil berdasarkan luas lahan. Dengan demikian, program kartu tani berjalan sesuai tujuan tanpa adanya bias dalam penentuan sasaran atau pelaksanaan distribusi.

### **Evaluasi Kebijakan dengan Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang diatur melalui sistem E-Verval yang memungkinkan verifikasi dan pemantauan data distribusi secara transparan. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memverifikasi data distribusi, sementara petani dan kios dapat melaporkan penyaluran melalui aplikasi yang mencatat setiap transaksi. Dengan cara ini, transparansi dan pertanggungjawaban dapat terjaga karena data distribusi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. E-Verval mendukung sistem pelaporan yang jelas, memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dan dapat dipantau secara real-time. Melalui sistem ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dalam distribusi pupuk, memberikan kejelasan dalam setiap langkah distribusi yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian Riki et al. (2022), indikator akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya dalam implementasi program kartu tani dan distribusi pupuk bersubsidi. Pengamatan menunjukkan bahwa petani mendapatkan haknya, seperti kartu tani, pupuk bersubsidi, dan pelayanan keluhan dari penyuluh. Tidak ada pengurangan jumlah pupuk di kios, dan kelebihan hanya sebagai antisipasi. Secara keseluruhan, distribusi pupuk mencukupi kebutuhan petani. Pihak BPP Pakisjaya juga melaksanakan penggunaan data laporan dan dana sesuai regulasi yang berlaku.

### **Evaluasi Kebijakan dengan Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan**

Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 umumnya sesuai dengan kebutuhan petani, terutama dalam jenis dan waktu distribusi pupuk. Sistem RDKK dan aplikasi i-Pubers memastikan distribusi tepat sasaran. Namun, terdapat kekurangan pasokan pupuk, terutama di musim tanam padat, yang masih menjadi tantangan. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berupaya meningkatkan alokasi pupuk dan menambah dukungan dengan pupuk non-subsidi yang terjangkau. Meskipun efektif, perbaikan dalam jumlah pasokan diperlukan agar kebijakan ini lebih optimal memenuhi kebutuhan petani.

Berdasarkan penelitian Riki et al. (2022), indikator kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk menilai apakah program kartu tani telah memenuhi kebutuhan utama petani. Program ini tidak hanya memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tertib, tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah lain yang dihadapi petani, seperti kelangkaan pupuk, akurasi pendataan, kemudahan pengajuan kredit usaha, dan manfaat tambahan sebagai tabungan. Dengan fitur-fitur tersebut, program kartu tani dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani, mendukung kegiatan pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Evaluasi menggunakan tujuh indikator dari teori Ripley menunjukkan bahwa mekanisme distribusi sudah terstruktur dengan baik, seperti pada aspek akses, cakupan, dan frekuensi distribusi yang sesuai musim tanam. Namun, kendala ditemukan pada pemahaman prosedur administrasi, kesesuaian alokasi pupuk, serta penggunaan sistem elektronik yang menyulitkan petani lanjut usia. Indikator akuntabilitas telah dipenuhi dengan baik, tetapi perbaikan pada alokasi pupuk saat puncak kebutuhan masih diperlukan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan perbaikan sistem untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif untuk petani dan penyederhanaan prosedur administrasi. Sistem elektronik juga harus diperbaiki agar lebih mudah digunakan oleh petani, terutama yang lanjut usia. Selain itu, alokasi pupuk perlu disesuaikan dengan kebutuhan pada puncak musim tanam, dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas distribusi.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Anhar, D., et al. (2012). This study aims to determine and describe the implementation of public service policies in the Cempaka market arrangement in Banjarbaru City seen from the standard theory of Policy Implementation according to Van Meter (in Winarno, 2012: 155).
- BPS Jombang. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang*. Retrieved from <https://jombangkab.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/2757324ec2a186c3eb07>

[9181/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-jombang-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html](https://www.jember.go.id/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-jombang-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html)

- Hariani, N. J. (2017). Evaluasi kinerja kebijakan kesehatan ibu dan anak (Studi evaluasi Policy Output dan Policy Outcome Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Menejemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Hidayat, A. O., et al. (2024). Kajian literatur: Dampak kebijakan pemerintah dalam. 241–245.
- Kementerian Pertanian RI. (2024). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*. Retrieved from [https://jdih.pertanian.go.id/sources/files/Permentan\\_01-2024\\_-\\_ttd.pdf](https://jdih.pertanian.go.id/sources/files/Permentan_01-2024_-_ttd.pdf)
- Kosmiko, N. (2021). Investigation of the economic criminal action of subsidized fertilizer abuse in the Solok Resort Police's Criminal Reserse Unit. *605(Icblt)*, 379–381.
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. *Jurnal Transaksi*, 11(1), 80–89. Retrieved from <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman kebijakan publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Napitupulu, H. (2024). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam keamanan pangan. *TOHAR MEDIA*.
- Ombudsman RI. (2021). Reformasi tata kelola pupuk bersubsidi: 5 (lima) potensi maladministrasi dan upaya perbaikannya. *Ombudsman Republik Indonesia*, 5(April), 1–8. Retrieved from [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20211203\\_171112.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/654/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20211203_171112.pdf)
- Putri, S. R. D. (2021). *Analisis sistem pengendalian internal atas persediaan spare part (Studi pada AHASS Setio Motor)* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara), 43–51.
- Riki, R., Abdal, A., & Abdillah, W. S. (2022). Implementasi kebijakan program kartu tani untuk distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.198>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: ALFABETA.
- Tuter, A. (2023). Kementan catat produksi pupuk dalam negeri kurang. *Radio Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/bisnis/187491/kementan-catat-produksi-pupuk-dalam-negeri-kurang>

Yennita Sihombing. (2022). Kebijakan pembangunan pertanian berbasis inovasi teknologi sebagai upaya peningkatan produksi komoditas pertanian strategis dan pendapatan petani mendukung ketahanan pangan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 137–143. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/7377>

Yulianto. (2012). *Evaluasi implementasi kebijakan* [Disertasi preprint].